



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : FADILLAH USMAN

NIK : 1871101301920002

Lembaga : MAHKAMAH AGUNG

Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

Sub Unit Kerja : PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG

Jabatan : HAKIM

Jenis Laporan : Khusus - Awal Menjabat

Tanggal Kirim : 6 Juli 2020

Catatan Hasil Verifikasi Administrasi:

Lengkap

Tidak Lengkap



**) Lembar ini adalah bukti resmi penyampaian LHKPN setelah melalui proses verifikasi administrasi.*

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Juli 2020/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FADILLAH USMAN
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 766146

II. DATA HARTA

| | | |
|---|-----|------------|
| A. TANAH DAN BANGUNAN | Rp. | ---- |
| B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN | Rp. | 7.000.000 |
| 1. MOTOR, HONDA VARIO MATIC 125CC Tahun 2012, HADIAH Rp. 7.000.000 | | |
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | ---- |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | ---- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 5.000.000 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | 37.000.000 |
| Sub Total | Rp. | 49.000.000 |
| III. HUTANG | Rp. | 11.850.540 |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 37.149.460 |

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **27 November 2020**.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.